



PEMERINTAH
KABUPATEN
JEMBER

RENJA PERUBAHAN 2026

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
JEMBER 2026

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun Kedua dari dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029. Sasaran prioritas pembangunan Dinas Perhubungan Tahun 2026 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2026.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 harus mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan arah dan tujuan pembangunan daerah. Sinkronisasi dan penyelarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah merupakan bagian integral dari pembangunan di daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas Perhubungan Jember pada tahun anggaran 2026. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember tahun 2026 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program /kegiatan pada tahun 2026.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	70
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	72
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	72
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	73
3.3 Program dan Kegiatan	74
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	75
BAB V. PENUTUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026 Kabupaten Jember	6
Tabel Indikator Kinerja Utama (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember.....	27
Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.....	30
Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	46
Tabel T-C. 32. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	71
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - l. Peraturan Bupati Jember Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
 - m. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran lebih teknis, konkrit dan substansial dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2025-2029;
2. Sebagai penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2026;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya visi-misi Kepala Daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan; Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan..

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program atau kegiatan atau sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 didasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember pada tahun 2025 mendapatkan total anggaran sebesar Rp 29.391.938.302,- yang akan digunakan untuk mendukung berbagai program peningkatan layanan transportasi, pengembangan infrastruktur, serta optimalisasi keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah Kabupaten Jember. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sistem manajemen transportasi modern, meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan, serta mendukung inovasi-inovasi pelayanan publik agar semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENCANA KERJA Dinas Perhubungan dan Pencapaian RENCANA STRATEGIS

Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENS TRA) Tahun 2021- 2026	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kegiatan Program dan (2024) Tahun Lalu			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisa si RENJA Perangk at Daerah tahun 2024	Tingk at Realis as (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR A (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR A (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib laporan dokumen perencanaan	100%	100	100	100	100%	100	100	100%
2	15	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	10 dokumen	4	4	2	75%	2	8	80%
2	15	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	4	3	1	33%	3	8	80%
2	15	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR A (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ b u l a n	75	75	75	100%	75	75	100%
2	15	01.2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	36	12	11	92%	12	59	82%
2	15	01.2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	100%	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01.2	04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	10 Laporan	4	4	0	0%	2	6	60%
2	15	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	100%	100	100	100	100%	100	100	100%
2	15	01.2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	20	10	10	100%	10	40	80%
2	15	01.2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	10 Paket	5	2	2	100%	2	9	90%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR A (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Kantor yang Disediakan								
2	15	01.2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	10	10	10	100%	10	30	75%
2	15	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50	50	30	60%	10	90	90%
2	15	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan	100%	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR A (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						kebutuhan dasar operasional OPD								
2	15	01.2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	20	12	10	83%	12	42	84%
2	15	01.2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	10	3	3	100%	3	16	80%
2	15	01.2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase tingkat pemenuhan	100%	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR A (%)
1					2	3	4	n-3 5	n-2 6	n-2 7	8 = (7/6)	n-1 9	n-1 10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan dasar operasional OPD								
2	15	01.2	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	20	70	70	100%	10	100	100%
2	15	01.2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	20	20	10	50%	30	60	60%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Prosentase tersedianya sarana,	90%	90	90	90	90%	90	90	90%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR A (%)
1					2	3	4	n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
									6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	prasarana dan fasilitas jalan								
2	15	02.2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02.2	02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 Unit	4	4	1	25%	4	9	45%
2	15	02.2	02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	200 Unit	50	100	100	100%	20	170	85%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1					2	3	4	n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
								5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2	15	02.2	02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	24 Lokasi	4	4	4	100%	4	12	50%
2	15	02.2	02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 Unit	50	50	45	90%	50	145	58%
2	15	02.2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal	90%	90	90	90	90%	90	90	90%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisa si Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Penumpang Tipe C yang Tersusun								
2	15	02.2	03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	6 Dokumen	3	1	1	100% 02.2.	1	5	83%
2	15	02.2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan	90%	90	90	90	90%	90	90	90%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR A (%)
1					2	3	4	n-3	n-2	n-2	8 = (7/6)	n-1	n-1	
								5	6	7		9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
2	15	02.2.	04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	3	1	1	100%	1	5	83%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02.2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	90%	90	90	90	90%	90	90	90%
2	15	02.2	05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	36 Unit	18	6	6	100%	6	30	83%
2	15	02.2	05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	36Unit	18	6	6	100%	6	30	83%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR A (%)
1					2	3	4	n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
								5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Bermotor yang Terpelihara								
2	15	02.2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2	15	02.2	06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	288 Laporan	144	48	44	92%	48	236	82%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02.2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	2	2	100%	2	2	100%
2	15	02.2	09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	1566 Unit	783	261	261	100%	261	1305	83%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
							n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Kabupaten/Kota yang Tersedia								
2	15	02.2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Yang beroperasi	3 Bus	3	3	100%	3	3	100%
2	15	02.2	14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	12Lapora n	6	2	100%	2	10	83%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Target RENSTR A (%)
1					2	3	4	n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
								5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Bandara Untuk Meningkatkan Frekuensi Penerbangan	60%	60	60	60	60%	60	60	100%
2	15	04.2	01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Bandara Untuk Meningkatkan Frekuensi Penerbangan	60%	60	60	60	100%	60	60	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	04.2	01	0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	6 Dokumen	3	1	1	100%	1	5	83%
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan perlintasan sebidang	2 Kegiatan	2	2	2	100%	2	2	100%
2	15	05.2	02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi	2 Dokumen	2	2	2	100%	2	2	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
2	15	05.2	02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian	18Lapora n	6	2	2	100%	2	10	55%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kegiatan Program dan (2024) Tahun Lalu			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Targ et RENJ A Perangk at Daerah tahun 2024	Realisa si RENJA Perangk at Daerah tahun 2024	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTR A (%)
								n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah								
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah database akses transportasi	1 Dokumen	1	-	-	-	-	-	100%
2	15	03.2	12		PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	1 Dokumen	1	-	-	-	-	-	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTR A) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target progra m dan kegiata n (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTR A Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1					2	3	4	n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	03.2	12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	1	-	-	-	-	-	-100%

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja 2025 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026, yaitu:

Pada Tahun 2025 terdapat Dinas Perhubungan memiliki 3 (tiga) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan, 3 (Tiga) program yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja pada PK Perubahan Tahun 2025 seluruhnya tercapai dan bahkan melampaui target kinerja yaitu pada indikator :

1. Indeks Infrastruktur Perhubungan
Target : 47,9, realisasi: 47,9 dengan tingkat capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi)
2. Presentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
Target : 69,98 %, realisasi : 70,12 % tingkat capaian kinerja 100,2% (Sangat Tinggi)
3. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
Target : 41 %, realisasi : 43.75 % tingkat capaian kinerja 106,7% (Sangat Tinggi)
4. Persentase realisasi anggaran
Target : 100 %, realisasi: 86,58% (Tinggi)

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2025 adalah :

1. Sasaran / target / program kerja yang di tuju sesuai dengan yang di rencanakan dalam renstra
2. Anggaran yang di rencanakan dapat di maksimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendukung target renstra setiap tahunnya
3. Program Kerja yang berkelanjutan dan inovasi

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi tersebut adalah :

1. Program Kerja dan arah kebijakan Dinas Perhubungan disesuaikan dengan target renstra setiap tahunnya hingga ujung akhir tahun renstra 2026
2. Anggaran menyesuaikan kebutuhan urgensi Dinas Perhubungan seperti pembebasan lahan Bandara Notohadinegoro guna kepastian legalitas status lahan bandara, penyediaan sarana prasarana bandara yang masih belum optimal
3. Skala prioritas program kerja agar semua program dapat berjalan sesuai target

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terpenuhinya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik	Persentase Tersedianya Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Jalan	Formulasi Perhitungan : $\left(\frac{\sum \text{sarana prasarana dan fasilitas jalan}}{\sum \text{fasilitas terpasang}} \right) \times 100\%$ Penjelasan : - Sarana Prasarana jalan adalah Fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. - Fasilitas jalan adalah Bangunan atau alat yang digunakan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Bidang Sarana Prasarana	Data Sarana, Prasarana dan fasilitas Jalan

		Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan - Jumlah fasilitas terpasang adalah 6463 unit berdasarkan rekap dari data Dinas Perhubungan tahun 2011-2024		
	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Bandara untuk Meningkatkan Frekuensi Penerbangan	Formulasi Perhitungan : $\frac{(\sum \text{sarana prasarana bandara tahun } n) - (\sum \text{sarana prasarana bandara tahun } n-1)}{(\sum \text{sarana prasarana bandara tahun } n-1)} \times 100\%$ Penjelasan : - Sarana Prasarana Bandara adalah semua fasilitas yang terdiri dari peralatan, utilitas dan Pelayanan Darurat yang dipergunakan untuk keperluan operasional Bandar Udara dan Penerbangan Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara	UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Data Sarana, Prasarana Bandara Lalu Lintas Lainnya

		- Data Jumlah sarana prasarana bandara diperoleh dari dokumen Aerodrome Manual atau data Aset Bandara		
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perlindungan Sebidang Kereta Api	Formulasi Perhitungan : Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan perlintasan sebidang kereta api selama setahun	Bidang Keselamatan	Data Kegiatan Sosialisasi Keselamatan

Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
			2025	2025
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan (Indeks)	47,9	47,9
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transportasi	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	69,98 %	70,12%
		Rasio konektivitas kabupaten / kota	41	43,75%

Penjelasan Tabel TC. 30 :

Menerangkan pencapaian dan kendala indikator tujuan dan sasaran tahun sebelumnya

Dari tabel TC-30 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terlihat :

1. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Perhubungan rata rata mencapai 100,3 % dan masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2025 menunjukkan 95,3%, Dengan demikian maka secara umum Dinas Perhubungan telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang perhubungan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2026 -2030.
2. Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Presentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Jalan	54,15%	57,64%	69.97 %	
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Keselamatan	0	2	4	
	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Bandara	72,2%	72,2%	46.15 %	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
					2025
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan				47,9
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal				70,12 %

	Rasio Konektivitas Kabupaten /Kota				43,75 %
--	---------------------------------------	--	--	--	---------

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

1. *Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan **hal kritis** yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;*
uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. **Permasalahan dan hambatan** yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. **Dampaknya** terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. **Tantangan dan peluang** dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. *Formulasi isu-isu penting berupa **rekomendasi dan catatan** yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.*

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yaitu meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang diperlu diperhatikan, adalah:

Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan selama satu tahun berjalan, tantangan dan peluang yang ada, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	Isu Strategis	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan	1. Semakin bertambahnya kemacetan lalu lintas	1. Semakin banyak pengguna kendaraan pribadi 2. Tingginya hambatan samping; 3. Volume lalu lintas yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan sesuai dengan perhitungan V/C Ratio; 4. Kurang efektifnya manajemen rekayasa lalu lintas; 5. Perlunya rekayasa penataan parkir yang lebih baik di bahu jalan; 6. Penertiban pemanfaatan fungsi jalan selain kendaraan

			bermotor masih lemah (Contoh : PKL disepanjang jalan utama maupun area kampus)
		2. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	1. Masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas; 2. Masih kurangnya penegakan regulasi di bidang lalu lintas; 3. Kondisi topografi jalan yang berbelok dan naik turun; 4. Bertambahnya daerah rawan kecelakaan dan kurang optimalnya penanganan daerah rawan kecelakaan;
		3. Kurangnya kesadaran pengguna jalan	1. Kurangnya edukasi keselamatan berlalu l 2. Keselamatan lalu lintas masih dianggap belum penting dan belum menjadi pokok permasalahan yang mendesak.
2	Prasarana pengujian kendaraan bermotor bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Status kepemilikan tanah dan bangunan yang sedang digunakan oleh UPT	Belum adanya Lahan tempat pengujian kendaraan bermotor

		Pengujian Kendaraan Bermotor Jember (Kaliwates) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	milik Pemkab Jember yang memadai
3	Fasilitas Pengujian yang belum optimal	Belum terpenuhinya fasilitas pengujian kendaraan bermotor agar dapat mengakomodir seluruh jenis kendaraan bermotor wajib uji yang akan dilayani	1. Akses jalur masuk dan keluar pada gedung pengujian membutuhkan pembenahan berupa perkerasan jalan 2. Line pengujian membutuhkan penambahan dan perbaikan berupa perkerasan jalan dan pengecatan menggunakan cat sintesis 3. Perlu perlengkapan alat pelindung diri terhadap seragam penguji sesuai dengan ketentuan 4. Penataan alur uji kendaraan dan pembenahan pada fasilitas parkir antrian kendaraan uji . Perlu peremajaan Alat Uji Kendaraan
4	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi penguji	Belum adanya penambahan dan	Belum adanya pembukaan formasi

		peningkatan tenaga penguji berkala	terkait penambahan tenaga penguji
5	Belum optimalnya penyediaan fasilitas parkir untuk umum	1. Belum maksimal PAD dari retribusi parkir 2. Belum optimalnya pengelolaan bahu jalan sebagai lahan parkir. 3. Masih banyaknya tempat hiburan, gedung pertokoan yang belum menyediakan lahan yang cukup untuk parkir kendaraan	1. Penarikan retribusi parkir perlu konsep dan pelaksanaan yang jelas agar dapat maksimal (meminimalisir jukir liar/pungli) 2. Penataan parkir masih belum optimal sesuai regulasi 3. Masih banyak pemilik tempat hiburan, gedung dan pertokoan belum memahami regulasi pendirian bangunan 4. Perlunya sosialisasi terkait regulasi penyediaan fasilitas parkir untuk umum
6	Belum adanya kejelasan status tanah Terminal Tipe C (Terminal Balung, Terminal Puger, Terminal Tanggul, Terminal Sukowono)	Masih dalam proses sengketa dengan pihak Desa	Status kepemilikan tanah yang digunakan untuk terminal belum memiliki legalitas hukum
7	Beroperasinya kendaraan sewa khusus (Kendaraan online)	Beroperasinya angkutan sewa khusus (angkutan online) yang belum dilengkapi perijinan angkutan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak adanya kantor cabang	Lemahnya pengawasan terkait regulasi ASK (angkutan sewa khusus) sehingga upaya penindakan terhadap operasional angkutan sewa khusus belum maksimal

8	Banyaknya kendaraan umum yang beroperasi tidak memenuhi persyaratan kelaikan jalan dan ketentuan perijinan angkutan umum	Menurunnya kesadaran pengusaha angkutan umum dalam hal permohonan perijinan penyelenggaraan angkutan umum (ijin trayek, uji laik jalan, SIM sesuai ketentuan)	1. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi 2. Belum adanya peremajaan angkutan umum
9	Over dimensi dan over load (ODOL) kendaraan angkutan barang	Pengusaha angkutan umum kurang memperhatikan aspek keselamatan yang dapat mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan	1. Pelanggaran muatan dan tidak beroperasinya jembatan timbang untuk pengawasan kelebihan muatan dan over dimensi kendaraan barang 2. Upaya pengawasan dan pengendalian terhadap over dimensi dan over load angkutan barang yang membutuhkan koordinasi dan penindakan hukum yang melibatkan instansi terkait
10	Rendahnya performa angkutan kota/pedesaan	1. Kondisi angkutan umum baik angkot dan angdes yang semakin menurun baik kualitas maupun kuantitas 2. Perlu perbaikan	1. Menurunnya pengguna angkot dan angdes karena waktu tempuh yang tidak sesuai (terlalu lama ngetem/berhenti menunggu penumpang)

		manajemen pengelolaan dan manajemen waktu pelayanan sehingga bisa survive dengan perkembangan waktu	2. Usia kendaraan yang sudah tidak laik dan melebihi umur ekonomis kendaraan 3. Penyebaran pelayanan angkutan kota dan angdes yang tidak merata
11	Sebaran wilayah pelayanan angkutan umum belum merata	1. Perkembangan wilayah dan pemukiman yang belum terlayani angkutan umum 2. Perlu dilakukan mapping analisa kebutuhan angkutan massal di beberapa wilayah baru/ berkembang	1. Tidak adanya minat operator angkutan umum yang siap untuk melayani angkutan di beberapa wilayah berkembang 2. Pola subsidi angkutan umum yang masih terbatas untuk memberikan pelayanan di wilayah baru atau berkembang
12	Tidak memadainya dan tersedianya angkutan khusus pelajar dan pelayanan angkutan pelajar yang mempunyai akses yang baik menuju sekolah	1. Banyaknya penggunaan kendaraan bermotor pribadi oleh pelajar 2. Rendahnya kesadaran berlalu lintas dari pihak orang tua dan sekolah	1. Jumlah ketersediaan angkutan sekolah gratis (ASG) dan angkutan kawasan kampus (AKK) yang terbatas 2. Pola bantuan berupa sewa angkutan kota maupun angkutan desa sebagai angkutan sekolah gratis masih terbatas
13	Terdapat beberapa kendaraan yang tidak bisa melakukan uji karena spesifikasi tidak sesuai SRUT	Pihak dealer atau ATPM melampirkan SRUT yang berbeda spesifikasinya	Pemilik kendaraan melakukan modifikasi yang tidak sesuai SRUT standar

14	Banyaknya kendaraan yang mati uji	Pemilik kendaraan tidak melakukan uji kendaraan	1. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan 2. Kurangnya sosialisasi dan penindakan kendaran mati uji 3. Lokasi uji kir kendaraan terlalu jauh dari beberapa wilayah 4. Uji kendaraan masih bersifat statis (datang ke balai uji kir), belum bisa dinamis (melayani di beberapa wilayah/ jemput bola)
----	-----------------------------------	---	--

15	Saat ini Bandar Udara Notohadi Negoro Jember beroperasi pada kelas III dengan jenis pelayanan AFIS dengan tipe pesawat terbesar yang melayani berkapasitas sedang/ menengah dengan waktu tempuh maksimal 1 jam perjalanan (Rute Surabaya – Jember)	Pelayanan penerbangan dengan rute jarak tempuh yang lebih jauh dan kapasitas penumpang dan kargo lebih besar diperlukan peningkatan dan kelas pelayanan Bandar Udara sehingga memerlukan peningkatan sarana prasarana, personil dan prosedur pelayanan	1. Diperlukan lahan area bandara yang lebih luas dari yang sekarang ada/ pemindahan ke lahan yang lebih luas milik Pemkab Jember 2. Panjang/lebar dan perkerasan Runway, Apron, dan Taxiway hanya mampu melayani pesawat sekelas ATR 72 sehingga diperlukan penambahan Panjang/ lebar runway (1645 x 30 m menjadi 2500 x 45 m); apron (96 x 68 m menjadi 130 x 100 m); dan taxiway (141 x 18 m menjadi 155 x 23 m) serta kekuatan landasan (24 F/C/X/T menjadi 48 F/C/X/T) untuk mengakomodir pesawat berbadan besar. 3. Diperlukan pembuatan RESA seluas 10.800 m², dan perataan runway strip berikut drainase. 4. Diperlukan perbaikan dan peningkatan pagar perimeter agar sesuai dengan KP 601 Tahun 2015 tentang Standar
----	--	--	--

			Pagar untuk Daerah Kemanan Terbatas Bandar Udara 5. Fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan banyak belum tersedia dan belum memenuhi persyaratan (X-Ray, Mobil PKK-PK , alat berat pendukung, dll). 6. Belum memiliki Tower ATC, serta instrumen navigasi dan alat bantu pendaratan yang memadai. 7. Bangunan terminal dan fasilitas pendukung masih kurang memadai. 8. Memerlukan fasilitas pendukung untuk sekolah penerbangan (Hangar, bangunan pendukung, runway light, dll). 9. Ketersediaan kompetensi/rating/lisensi personel yang belum memenuhi kebutuhan. 10. Diperlukan perawatan rutin dan kalibrasi peralatan bandara secara berkala setiap tahun
--	--	--	---

16	Kegiatan transportasi laut di pesisir pantai selatan Kabupaten Jember sangatlah ramai dan padat, baik itu perahu nelayan untuk perekonomian maupun perahu wisata untuk pariwisata. Sedangkan ketinggian pasang surut air laut menjadi kendala dalam pengoperasian kapal keluar masuk ke pesisir pantai	Dalam rutinitas kerjanya para nelayan dan para pengelola wisata laut ini memiliki kendala dalam operasional perahu baik itu perahu nelayan maupun perahu wisata karena belum adanya dermaga yang memadai sehingga menyulitkan perahu untuk keluar masuk ke pesisir pantai	1. Belum adanya dermaga 2. Kesadaran pelaku wisata akan keselamatan pelayaran sangat minim 3. Beberapa kawasan puger sampai gumukmas belum tersentuh Pokdarwis 4. Tingkat sedimentasi di muara sungai status nasional sangat tinggi 5. Belum memiliki kelengkapan dokumen kapal dan alat keselamatan pelayaran 6. Belum ada perahu khusus wisata 7. Belum ada sentuhan pembangunan pada wilayah sungai dan pesisir 8. Belum adanya mapping wilayah yang mampu menggambarkan potensi wisata perairan dan masuk dalam kalender festival/acara Kabupaten Jember
----	---	--	---

17	Perlintasan Kereta Api	Penanganan keselamatan di pintu perlintasan sebidang	1. Masih terdapat beberapa titik yang belum ada rekomendasi lokasi untuk pemasangan alat keselamatan perlintasan, pos jaga dan palang pintu 2. Banyak pintu perlintasan liar/ swadaya masyarakat pada jalan lingkungan 3. Minimnya anggaran untuk alat keselamatan baik daerah, propinsi, dan DAOPS 9 Jember
18	Sosialisasi Tertib Berlalu-lintas	Keiatan sosialisasi tertib berlalu lintas belum maksimal	1. Minimnya alat peraga dan anggaran yang tersedia menyebabkan kurangnya sosialisasi keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah 2. Relokasi taman lalu lintas ke area kantor dinas perhubungan yang baru tidak memungkinkan mengingat lahan dinas perhubungan yang baru terbatas

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. *Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;*
2. *Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;*
3. *Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda*

2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember walaupun capaiannya dapat dikatakan sangat berhasil, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Pelayanan angkutan umum yang kurang baik sehingga menyebabkan kendaraan pribadi masih dominan ;
2. Terjadinya kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan pada jam-jam sibuk ;
3. Belum terpenuhinya secara keseluruhan fasilitas perlengkapan jalan ;
4. Belum adanya Terminal Barang (Terminal Kargo) sehingga seringkali bongkar muat barang di jalan perkotaan ;
5. Kondisi Terminal Angkutan Umum yang kurang baik ;
6. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh tidak disiplinnya dalam berlalu lintas di jalan ;
7. Belum optimalnya operasional Bandar Udara Notohadi Ngoro Kabupaten Jember.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah :

- Melakukan studi/ survey tentang penggantian angkutan umum yang layak diberlakukan di Kabupaten Jember ;
- Melakukan rekayasa lalu lintas jalan
- Mengusulkan penambahan fasilitas perlengkapan jalan
- Mengusulkan pembangunan Terminal Cargo untuk bongkar muat barang kepada Pemerintah Pusat;
- Mengusulkan dan melakukan rehabilitasi Terminal umum agar lebih laik.
- Melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas dan penegakan hukum secara rutin ;
- Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana bandar udara melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN (Kementerian Perhubungan) ;

Sehingga upaya-upaya tersebut perlu mendapat perhatian bersama untuk segera dilakukan, agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera teratasi.

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Jember dengan hasil analisis sebagai berikut

:Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas PerhubunganKabupaten Jember

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026
1	2	3	4	8	9	10	12
		DINAS PERHUBUNGAN				126.820.558.71 9,42	142.236.704.18 4,63
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				126.820.558.71 9,42	142.236.704.18 4,63
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				126.820.558.71 9,42	142.236.704.18 4,63
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD	100 %	100 %	27.829.753.522, 00	27.190.711.959, 30

		[Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran	-	-	27.829.753.522,00	27.190.711.959,30
			Presentase Indikator Program yang tercapai				
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen 3 Laporan	3 Dokumen 4 Laporan	162.117.000,00	325.047.400,00
	2.15.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokume n	3 Dokume n	90.441.000,00	122.371.400,00
	2.15.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3 Laporan	4 Laporan	71.676.000,00	202.676.000,00
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan	<i>Persentase terpenuhinya gaji</i>	100 %	100 %	11.190.093.452, 00	19.419.318.559, 30

		Perangkat Daerah	<i>dan tunjangan ASN</i>				
	2.15.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.703.493.452,00	18.964.318.559,30
	2.15.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	436.200.000,00	404.600.000,00
		-	-	-	-	27.829.753.522,00	27.190.711.959,30
	2.15.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026
1	2	3	4	8	9	10	12

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan	2 Laporan	50.400.000,00	50.400.000,00
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD</i>	100 %	100 %	1.960.627.770,00	1.472.800.000,00
	2.15.01.2.04.007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					

			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	4 Dokume n	4 Dokume n	1.960.627.770,0 0	1.472.800.000,0 0
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penggangan, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran Presentase Indikator Program yang tercapai	-	-	27.829.753.522, 00	27.190.711.959, 30
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD</i>	100 %	100 %	1.163.152.300,0 0	1.041.277.900,0 0

	2.15.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	2.873.000,00	5.855.700,00
	2.15.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	587.265.600,00	339.588.500,00
	2.15.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	2 Paket	2.427.000,00	22.459.000,00
	2.15.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026
1	2	3	4	8	9	10	12
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10 Paket	10 Paket	563.386.700,00	608.574.700,00

		-	-	-	-	27.829.753.522,00	27.190.711.959,30
	2.15.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan	11 Laporan	7.200.000,00	64.800.000,00
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran Presentase Indikator Program yang tercapai	-	-	27.829.753.522,00	27.190.711.959,30

	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD</i>	100 %	100 %	12.896.062.800,00	4.484.588.100,00
	2.15.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	592.680.000,00	630.300.000,00
	2.15.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan	3 Laporan	12.303.382.800, 00	3.854.288.100,0 0
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD</i>	100 %	100 %	457.700.200,00	447.680.000,00
	2.15.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	65 Unit	65 Unit	437.200.200,00	400.080.000,00
	2.15.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026
1	2	3	4	8	9	10	12
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	20 Unit	20.500.000,00	47.600.000,00

2,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. konektivitas jalan 2. persentase kelengkapan jalan yang sudah terpasang terhadap kondisi ideal	69,97 71,37 Angka %	69,97 71,37 Angka %	98.866.986.197, 42	114.356.360.92 5,33
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat]	Konektivitas Darat Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	-	-	98.866.986.197, 42	114.356.360.92 5,33
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	70 Unit	75 Unit	95.925.294.900, 00	86.872.836.405, 33
	2.15.02.2.02.001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					

			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	50 Unit	1 Unit	686.971.500,00	1.232.374.400,0 0
	2.15.02.2.02.0 002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	2500 Unit	1310 Unit	50.948.203.200, 00	37.706.774.365, 00
	2.15.02.2.02.0 003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					

			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	47 Unit	2 Unit	180.348.100,00	2.679.489.360,0 0
	2.15.02.2.02.0 004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	2154 Unit	2154 Unit	44.109.772.100, 00	45.254.198.280, 33

	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan penunjang) Yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	8 Unit	1 Unit	32.278.600,00	21.592.800,00
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026
1	2	3	4	8	9	10	12
			<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	8 Unit	1 Unit	32.278.600,00	21.592.800,00

	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kabupaten</i>	1 Laporan	1 Laporan	81.070.000,00	153.986.000,00
	2.15.02.2.04.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	81.070.000,00	153.986.000,00

	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor yang tersedia dan terpelihara</i>	7 Unit	4 Unit	272.033.897,42	217.210.520,00
	2.15.02.2.05.001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	5 Unit	1 Unit	152.033.897,42	104.210.520,00
	2.15.02.2.05.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	2 Unit	3 Unit	120.000.000,00	113.000.000,00
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota</i>	12 Kegiatan	12 Kegiatan	730.255.200,00	934.394.000,00
	2.15.02.2.06.004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					

			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	12 Laporan	730.255.200,00	934.394.000,00
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026
1	2	3	4	8	9	10	12
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Penilaian Hasil Andalalin</i>	12 Kegiatan	12 Kegiatan	6.600.000,00	203.300.000,00
	2.15.02.2.07.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin					

			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>	12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	203.300.000,00
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Kelompok Masyarakat / Pengguna Jasa Yang terlayani Angkutan</i>	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.819.453.600,00	25.953.041.200,00
	2.15.02.2.09.003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					

			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	3 Unit	3 Unit	1.819.453.600,00	25.953.041.200,00
3,	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1. konektivitas jalan 2. persentase kelengkapan jalan yang sudah terpasang	69.97 71.37 Angka %	69.97 71.37 Angka %	123.819.000,00	689.631.300,00
		[Meningkatkan Pengelolaan Perlindungan Kereta Api]	Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani	-	-	123.819.000,00	689.631.300,00
	2.15.05.2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Perlindungan Kereta Api yang ditangani</i>	2 Laporan	2 Unit	123.819.000,00	689.631.300,00

	2.15.05.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah</i>	2 Laporan	2 Laporan	123.819.000,00	689.631.300,00
	J U M L A H					126.820.558.719,42	142.236.704.184,63

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;*
- 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;*

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kewilayahan atau Kecamatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah :

Tabel T-C. 3.2. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	1440400	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Di Kabupaten Jember	Pembangunan PJU	100 titik	PJU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai tujuan ke-II Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan yakni Meningkatkan layanan kinerja transportasi untuk mendukung aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis :

- a. Ontime Performa Layanan Transportasi, dan
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi.

1. Kebijakan Umum Pengembangan Moda

1. Transportasi darat memiliki potensi yang besar dalam mempersatukan seluruh sistem transportasi
2. Untuk angkutan barang peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan(feeder) terhadap sistem transportasi nasional.
3. Arah pengembangan transportasi darat harus selaras dan terintegrasi dengan arah pengembangan moda transportasi lainnya.

2. Kebijakan Prioritas Pembangunan

1. Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat.
2. Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal.
3. Pembangunan perkotaan terutama di kota-kota besar diprioritaskan pada pengembangan angkutan massal (Bus Rapid Transit) berbasis Buy The Service (BTS), menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kehandalan angkutan umum.
4. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP.
5. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan SDP, rehabilitasi & pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP, pengembangan sarana SDP; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan.
6. Pembangunan PJU
7. Reaktivasi Bandar udara

3. Kebijakan Transportasi Darat dalam Otonomi Daerah

1. Mendorong daerah untuk menyusun perencanaan transportasi darat yang sinergisdengan rencana transportasi nasional.
2. Penyesuaian rencana transportasi nasional dengan kebijakan perencanaantransportasi di daerah.
3. Menjadi pedoman bagi perencanaan transportasi daerah.
4. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar daerah dalamrangka perencanaan transportasi nasional.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai kualifikasi dan kompetensi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi IV yaitu “ Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.” dan Tujuan yaitu “ Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah “

Untuk merealisasikan misi tersebut di atas agar dapat dicapai perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Misi dan Tujuan Kepala Daerah sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian misi dalam setiap tujuan ada sasaran yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan capai sebagai bentuk berjalannya misi adalah sebagai berikut :

Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman dan aman dan terjangkau:

Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik Tujuan **Non**

Rutin:

Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Sasaran **Non Rutin:**

1. Mewujudkan perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Berkualitas;
2. Menyediakan Kebutuhan Kajian Dalam Rangka Pembangunan Jember.

Tujuan **Rutin:**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien

Sasaran **Rutin:**

Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pemilihan program dan kegiatan disamping sebagai pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam tiap tahunnya juga mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Pencapaian SDGs.
3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
5. Memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat.
6. Pengembangan daerah pedesaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Prioritas Perangkat Daerah Perumusan Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Jember juga mengacu pada prioritas Nasional dan prioritas.

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	Kab. Jember	2.15.02.2.0 2.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	37.431.150.032	Pembangunan PJU dan Rambu
			2.15.02.2.0 2.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan	45.254.198.680.33	Rekening PJU
			2.15.02.2.0 2.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana jalan	2.679.489.360	Rehab Bandara
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	100%	Kab. Jember	2.15.02.2.0 9.003	Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (satu)	25.953.041.200	Subsidi Pesawat Oprasional bus sicinta Mudik Gratis

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana (Rp)	Keterangan
Jalan (LLAJ)				Daerah kabupaten/kota		

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
						TARGET 2026		RKPD PERUBAHAN 2026
						SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	7	8	9	12
		DINAS PERHUBUNGAN						142.236.704.184,63
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						142.236.704.184,63
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						142.236.704.184,63
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD			100 %	100 %	27.190.711.959,30
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengganggaran, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran Presentase Indikator Program yang tercapai	100 79.8 90	100 79.3 89.78	-	-	27.190.711.95 9,30

	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Dokumen 3 Laporan	3 Dokumen 4 Laporan	325.047.400,00
	2.15.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	122.371.400,00
	2.15.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3 Laporan	4 Laporan	202.676.000,00
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN</i>			100 %	100 %	19.419.318.559,30
	2.15.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>			90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	18.964.318.559,30
	2.15.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	404.600.000,00
		-	-	-	-	-	-	27.190.711.959,30
	2.15.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>			12 Laporan	2 Laporan	50.400.000,00
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD</i>			100 %	100 %	1.472.800.000,00
	2.15.01.2.04.007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						

			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>			4 Dokumen	4 Dokumen	1.472.800.000,00
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran Presentase Indikator Program yang tercapai	100 79.8 90	100 79.3 89.78	-	-	27.190.711.959,30
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD</i>			100 %	100 %	1.041.277.900,00
	2.15.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>			1 Paket	1 Paket	5.855.700,00
	2.15.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>			1 Paket	1 Paket	339.588.500,00
	2.15.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>			2 Paket	2 Paket	22.459.000,00
	2.15.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>			10 Paket	10 Paket	608.574.700,00
		-	-	-	-	-	-	27.190.711.959,30
	2.15.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			50 Laporan	11 Laporan	64.800.000,00
		[Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengganggaran, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah]	Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran Presentase Indikator Program yang tercapai	100 79.8 90	100 79.3 89.78	-	-	27.190.711.959,30
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD</i>			100 %	100 %	4.484.588.100,00
	2.15.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>			12 Laporan	12 Laporan	630.300.000,00
	2.15.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>			3 Laporan	3 Laporan	3.854.288.100,00

	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD</i>			100 %	100 %	447.680.000,00
	2.15.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>			65 Unit	65 Unit	400.080.000,00
	2.15.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>			20 Unit	20 Unit	47.600.000,00
2,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. konektivitas jalan 2. persentase kelengkapan jalan yang sudah terpasang terhadap kondisi ideal			69,97 71,37 Angka %	69,97 71,37 Angka %	114.356.360.925,33
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat]	Konektivitas Darat Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	69.97 78.80	69.97 71.37	-	-	114.356.360.925,33
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>			70 Unit	75 Unit	86.872.836.405,33
	2.15.02.2.02.001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						

			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>			50 Unit	1 Unit	1.232.374.400,00
	2.15.02.2.02.002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>			2500 Unit	1310 Unit	37.706.774.365,00
	2.15.02.2.02.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						

			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>			47 Unit	2 Unit	2.679.489.360,00
	2.15.02.2.02.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>			2154 Unit	2154 Unit	45.254.198.280,33

	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan penunjang) Yang terehabilitasi dan terpelihara</i>			8 Unit	1 Unit	21.592.800,00
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						
			<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>			8 Unit	1 Unit	21.592.800,00

	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kabupaten</i>			1 Laporan	1 Laporan	153.986.000,00
	2.15.02.2.04.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			1 Laporan	1 Laporan	153.986.000,00

	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor yang tersedia dan terpelihara</i>			7 Unit	4 Unit	217.210.520,00
	2.15.02.2.05.001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>			5 Unit	1 Unit	104.210.520,00
	2.15.02.2.05.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>			2 Unit	3 Unit	113.000.000,00
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>			12 Kegiatan	12 Kegiatan	934.394.000,00
	2.15.02.2.06.004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						

			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>			12 Laporan	12 Laporan	934.394.000,00
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Penilaian Hasil Andalalin</i>			12 Kegiatan	12 Kegiatan	203.300.000,00
	2.15.02.2.07.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						

			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>			12 Laporan	12 Laporan	203.300.000,00
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Kelompok Masyarakat / Pengguna Jasa Yang terlayani Angkutan</i>			3 Kegiatan	3 Kegiatan	25.953.041.200,00
	2.15.02.2.09.003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>			3 Unit	3 Unit	25.953.041.200,00
3,	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1. konektivitas jalan 2. persentase kelengkapan jalan yang sudah terpasang			69.97 71.37 Angka %	69.97 71.37 Angka %	689.631.300,00
		[Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api]	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	3	3	-	-	689.631.300,00
	2.15.05.2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani</i>			2 Laporan	2 Unit	689.631.300,00
	2.15.05.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah		2 Laporan	2 Laporan	689.631.300,00
	J U M L A H						142.236.704.184,63

Penjelasan :

1. Dimohon untuk **mengisi tujuan dan sasaran pada masing masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**
2. Dimohon untuk menguraikan **aktifitas/event pada setiap sub kegiatan yang digunakan**

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang berpedoman kepada RENSTRA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Harapan kami, semoga keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember nantinya akan menjadi pedoman pedoman penyusunan program kegiatan OPD serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Jember tidak lepas dari dukungan, partisipasi dan koordinasi dari instansi dan stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Dengan ditetapkannya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2026, selanjutnya, dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2026.

Jember, 28 Juli 2026

Kepala Dinas Perhubungan



Gatot Triyoho, Amd, LLAJ, ST, M.Si
Pembina Tk. I/ IVb
NIP. 19790306 2001121 002